INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SURABAYA TAHUN 2023

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SURABAYA TAHUN 2023

<https://surabayakota.go.id>

A photograph of a man and a woman walking together in a park. The man is on the right, wearing a light blue button-down shirt over a white t-shirt and light-colored pants. The woman is on the left, wearing a light-colored long-sleeved top and pants. They are both smiling and looking towards each other. The background is a soft-focus scene of trees and foliage, with a warm, golden light suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is peaceful and romantic.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA 2023

Nomor Publikasi : 35780.2344
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 63 halaman

Naskah/Penyunting/Desain Sampul :
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Diterbitkan dan Dicitak oleh :
© Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

***Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan,
Mengomunikasikan, dan/atau Menggandakan Sebagian
atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial
Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik***

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA 2023

Pengarah

Dr. Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si

Kordinator Teknis

Septa Noor Pradhani, S.ST

Penyunting

Septa Noor Pradhani, S.ST

Penulis

Anilur Rohman, A.Md

Pengolah Data

Anilur Rohman, A.Md

Desain Sampul dan Infografis

Anilur Rohman, A.Md

Layout

Bilal Ali Maghshar Sri Muljono, S.ST

<https://surabayakota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Surabaya, November 2023
Kepala BPS Kota Surabaya

Dr. Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

BAB 1 1
Latar Belakang dan Ruang Lingkup

BAB 2 5
Kependudukan

BAB 3 13
Kesehatan

BAB 4 19
Pendidikan

BAB 5 27
Ketenagakerjaan

BAB 6 35
Tarf dan Pola Konsumsi

BAB 7 41
Perumahan dan Lingkungan

BAB 8 45
Kemiskinan

BAB 9 51
Sosial Lainnya

Lampiran 56

<https://surabayakota.bps.go.id>

BAB 1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Sejahtera idealnya dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat di suatu wilayah hidup dengan makmur, hidup dengan nyaman, sehat, dan berkecukupan. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka semakin baik pula kualitas hidup di wilayah tersebut. Untuk mencapai kondisi itu diperlukan kemampuan dari setiap individu dan didorong oleh pemerintah di wilayah tersebut.

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan yang merata. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pembangunan yang lebih baik dari waktu ke waktu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Surabaya dilakukan untuk mewujudkan derajat kehidupan yang lebih sehat, layak, dan manusiawi.

Pembangunan tanpa pengukuran hasil hanya akan menjadi agenda rutin dan menjadi tidak berarti. Perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah perlu mengetahui hasil dari pembangunan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pembangunan, agar kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang dapat mencapai sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sekaligus menjadi contoh bagi pembangunan di wilayah lain.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan dapat dilakukan dengan melihat indikator kesejahteraan rakyat, sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan. Apabila indikator yang ada menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pembangunan relatif sudah mencapai sasaran yang dituju, demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dimaksud antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, sementara data yang tersedia masih terbatas, sehingga tidak semua aspek yang mendukung kesejahteraan rakyat dibahas dalam publikasi ini. Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan dan aspek lainnya.

Tujuan Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Jenis dan Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Tahun 2023 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan, tabel-tabel, dan gambar. Pada setiap bab disertakan ulasan, sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang terkait dengan topik bahasan pada bab yang bersangkutan.

Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, ditambah data penunjang lainnya yang berasal dari survei dan sumber data lainnya.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhiran 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Sistem Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I menyajikan tentang Pendahuluan
- Bab II menyajikan tentang Kependudukan
- Bab III menyajikan tentang Kesehatan
- Bab IV menyajikan tentang Pendidikan
- Bab V menyajikan tentang Ketenagakerjaan
- Bab VI menyajikan tentang Taraf dan Pola Konsumsi
- Bab VII menyajikan tentang Perumahan dan Lingkungan
- Bab VIII menyajikan tentang Kemiskinan
- Bab IX menyajikan tentang Sosial Lainnya

KEPENDUDUKAN KOTA SURABAYA

Jumlah Penduduk 2019-2023 (Juta Jiwa)

Komposisi Jenis Kelamin 2022

49,56%

50,44%

Simokerto Dengan Kecamatan Terpadat 2022

33.186 jiwa per km²

Rasio Jenis kelamin 2022

Angka Beban Ketergantungan

42,60%

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi

BAB 2 Kependudukan

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah, Komposisi Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini di Kota Surabaya dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Bila dilihat pada tabel 2.1, jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi penduduk tahun 2023 tercatat sebanyak 2,91 juta jiwa mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 2,88 juta jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kota Surabaya telah mengalami penambahan penduduk sebesar 24,2 ribu jiwa.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2019 - 2023 (Jiwa)

Periode	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
2019	2.897.245
2020	2.874.314
2021	2.880.284
2022	2.887.223
2023	2.911.433

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2023

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dapat dilihat melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang mendiami suatu wilayah. Jika melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur, salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah angka rasio ketergantungan. Sementara komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui menurut indikator rasio jenis kelamin. Indikator ini digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Perubahan penduduk menurut kelompok umur dapat mempengaruhi angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun keatas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan juga memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2022 (Ribuan Jiwa)

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2023

Dari piramida penduduk di atas dapat dilihat bahwa Kota Surabaya lebih banyak dihuni oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 2,02 juta jiwa atau sebesar 70,13 persen dari total penduduknya. Persentase penduduk muda yang belum memasuki usia produktif (0-14 tahun) sebesar 22,51 persen dan penduduk tua yang tidak produktif lagi (lebih dari 64 tahun) sebesar 7,36 persen. Jika dihitung rasio ketergantungannya, kota Surabaya memiliki nilai sebesar 42,60 persen, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 42 sampai 43 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas).

Angka ketergantungan yang mulai mendekati angka 50 harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus mulai mempersiapkan fasilitas-fasilitas penunjang saat penduduk usia produktif memasuki masa-masa tidak produktif lagi. Seperti fasilitas kesehatan dan perlindungan sosial untuk penduduk tersebut. Agar penduduk yang melewati transisi tersebut tidak membawa beban yang ditanggung di masa sebelumnya ke masa yang baru. Selain itu, perlu diperhatikan juga pemenuhan fasilitas untuk penduduk yang belum produktif ke penduduk produktif. Karena penduduk yang belum produktif memerlukan sekolah dan penambahan keterampilan untuk mampu bertahan dan berkelanjutan saat harus menanggung beban di masa produktifnya.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surabaya, Tahun 2022

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	1.431.041	49,56
Perempuan	1.456.182	50,44
Jumlah	2.887.223	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Nilai rasio jenis kelamin di kota Surabaya adalah 98,27 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah laki-laki hampir sama banyaknya dengan perempuan. Pada tahun 2022, persentase penduduk laki-laki di kota Surabaya adalah 49,56 persen sementara penduduk perempuan sebanyak 50,44 persen.

Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin menurut Umur Kota Surabaya, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2020

Jika rasio jenis kelamin dilihat menurut kelompok umur, terdapat delapan kelompok umur yang rasio jenis kelaminnya di bawah 100, yang berarti perbandingan penduduk perempuan dengan laki-laki di kelompok umur tersebut sama. Delapan kelompok umur tersebut tiga berada di kelompok umur tidak lagi produktif (65+ tahun) dan kelompok umur 40-64 tahun. Sementara selain kelompok umur tersebut memiliki nilai rasio jenis kelamin di atas 100 persen.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambah padatnya Kota Surabaya di tiap tahunnya. Padatnya pemukiman ini merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah penduduk namun luas wilayahnya tetap. Semakin padat suatu wilayah tentunya semakin menuntut perhatian yang lebih oleh semua pihak. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin sulit pula untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh penduduk, terutama perumahan karena luas lahan kosong/tidak terbangun menjadi semakin terbatas dari tahun ke tahun.

Tabel 2.3

Kepadatan Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2019-2023 (Jiwa/Km²)

Periode	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)
2019	8.262
2020	8.200
2021	8.217
2022	8.633
2023	8.705

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2020

Kepadatan penduduk di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk 8.705 jiwa per km² kota Surabaya naik sebesar 72 jiwa per km² dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kota Surabaya Menurut Kecamatan, Tahun 2022 (Per Km²)

Sumber : Surabaya Dalam Angka 2023

Dilihat dari kepadatan penduduk setiap kecamatan di kota Surabaya pada tahun 2022 yang terdiri dari 31 kecamatan, Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Simokerto sekitar 33.186 jiwa per km² yang artinya setiap 1 km² lahan di Kecamatan Simokerto dihuni oleh 33.186 jiwa, Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil di kecamatan Bulak sekitar 751 jiwa per km².

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (reversible) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Gambar 2.4 Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara KB, Tahun 2018-2022 (Persen)
Sumber : Susenas 2018-2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018-2022, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB berada pada kisaran 50 persen yaitu 50,21 persen pada 2018, 46,97 persen pada 2019, 51,36 persen pada 2020, dan 50,26 persen pada 2021. Pada tahun 2022 persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB Kota Surabaya telah mengalami penurunan sebesar 3,66 persen.

Tabel 2.4

Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/ Cara KB, Tahun 2021 dan 2022 (Persen)

Alat/Cara Kontrasepsi	2021	2022
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	7,31	12,41
MOP/Vasektomi	0,38	0,27
AKDR/IUD/Spiral	13,18	10,36
Suntikan	49,93	45,77
Susuk KB/Norplant/Implan/Alwalit	7,66	4,53
Pil	16,46	16,79
Kondom/Karet	5,09	6,24

Sumber : Susenas 2021-2022

Wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB di Kota Surabaya cenderung memilih menggunakan suntikan sebagai alat kontrasepsi, yakni mencapai 45,77 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penggunaan alat kontrasepsi suntikan ini mengalami penurunan signifikan. Penurunan pemilihan alat kontrasepsi ini tidak hanya terjadi pada alat KB suntik saja, namun juga pada alat MOP/Vasektomi, IUD/Spiral, dan susuk KB.

Menariknya adalah terjadinya pergeseran minat pemilihan alat KB oleh wanita usia 15-49 tahun di Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari peningkatan yang signifikan pada pemilihan KB dengan cara MOW/tubektomi yang pada tahun 2021 hanya sebesar 7,31 persen menjadi 12,41 persen dan pada pemilihan KB dengan cara kondom dari 5,09 persen menjadi 6,24 persen.

KESEHATAN KOTA SURABAYA

Umur Harapan Hidup 2022

74,47 tahun

rata-rata anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan akan hidup hingga mencapai kurang lebih usia 74-75 tahun, meningkat 0,29 poin dari tahun sebelumnya sebesar 74,18 pada tahun 2021

68,13
persen

45,04

Penerima
Bantuan
Iuran

27,58

Non Penerima
Bantuan
Iuran

29,51

Jaminan
Kesehatan
Daerah

Jenis Jaminan Kesehatan 2022

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan

1,39

Asuransi
Swasta

6,91

Perusahaan
Kantor

12,09

Tidak
punya

Penduduk Berobat Jalan 2022

BAB 3 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur utama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tetapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan meningkatkan produktivitasnya.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kesakitan, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase wanita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

Umur Harapan Hidup dan Angka Kesakitan

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Gambar 3.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Surabaya, Tahun 2018-2022 (Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Angka harapan hidup Kota Surabaya tahun 2022 cukup tinggi, yaitu 74,47. Rata-rata UHH di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir (2018–2022) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 73,88 (2018) menjadi 74,47 (2022), angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan akan hidup hingga mencapai kurang lebih usia 74-75 tahun.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 3.1
Angka Kesakitan Tahun 2021-2022 (Persen)

Penduduk	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	40,06	4,77
Perempuan	40,12	5,25
Jumlah	40,09	5,01

Sumber : Susenas 2021-2022

Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Surabaya mencapai 5,01 persen, mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 40,09 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 adanya pandemi covid-19. Angka Kesakitan penduduk laki-laki tahun 2022 sedikit lebih rendah dari penduduk perempuan, masing-masing 4,77 persen dan 5,25 persen.

Jaminan Kesehatan Penduduk

Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia sehingga kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada warga negaranya terutama terhadap warga negara yang kurang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu karena pengaruh ketidakmampuan secara ekonomi.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Dari seluruh penduduk Kota Surabaya, sebanyak 12,09 persen penduduk belum memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 3.2

Proporsi Penduduk di Kota Surabaya Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, Tahun 2022 (Persen)

Jenis Jaminan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerima Bantuan Iuran	44,59	45,48	45,04
Non Penerima Bantuan Iuran	27,48	27,68	27,58
Jaminan Kesehatan Daerah	29,14	29,87	29,51
Asuransi Swasta	1,47	1,3	1,39
Perusahaan/Kantor	7,28	6,56	6,91
Tidak punya	12,03	12,14	12,09

Sumber : Susenas 2022

Berdasarkan keikutsertaannya dalam jaminan kesehatan, penduduk Kota Surabaya terbagi dalam lima kelompok. Penduduk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 45,04 persen penduduk, penduduk non penerima bantuan iuran JKN sebesar 27,58 persen. Kelompok yang memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 29,51 persen. Penduduk yang memiliki asuransi swasta sebesar 1,39 persen. Serta penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan atau kantor sebesar 6,91 persen.

Dalam keikutsertaan jaminan Kesehatan ada kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 dalam kelompok penerima bantuan iuran proporsinya. Jaminan kesehatan terbesar yang dimiliki adalah penerima bantuan iuran.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata serta dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat lebih baik. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan pemberian jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Gambar 3.2 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Surabaya, Tahun 2022 (Persen)

Berdasarkan data Susenas 2022, dari seluruh penduduk Kota Surabaya yang berobat dan yang menggunakan jaminan kesehatan tercatat sebanyak 68,13 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pengguna jaminan kesehatan terdiri 65,84 persen penduduk laki-laki dan 69,71 persen penduduk perempuan. Melihat data tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran perempuan akan pentingnya jaminan kesehatan relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka tersebut sangat berkorelasi dengan angka harapan hidup laki-laki yang selalu lebih rendah dibanding perempuan.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Tabel 3.3
Perempuan Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan, Tahun 2021 – 2022 (Persen)

Jenis Jaminan Kesehatan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	100,00	100,00
- Dokter	60,27	67,92
- Bidan	39,73	32,08
- Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
- Dukun Tradisional	0,00	0,00
- Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Hasil Susenas 2021-2022

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana pada tahun 2021 persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 100,00 persen. Begitu pula dengan tahun 2022, dengan kata lain pada tahun 2022 semua proses persalinan di Kota Surabaya ditolong oleh tenaga kesehatan. Peran dokter dan bidan memegang peranan penting dalam pencapaian ini. Pada tahun 2022, penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter mendominasi sebesar 67,92 persen dari total persalinan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tingginya persentase penduduk Kota Surabaya yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/ klinik, dikarenakan lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik, sehingga

berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Tabel 3.4
Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2021 – 2022 (Persen)

Tempat Berobat	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	25,09	33,60	5,17	32,20	15,13	32,77
Praktek Dokter atau Klinik	46,16	40,89	89,38	34,57	67,77	37,16
Puskesmas	30,17	29,23	6,23	39,39	18,20	35,24
UKBM	0,69	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
Pengobatan Tradisional	0,81	0,00	0,73	0,00	0,77	0,00
Lainnya	4,34	1,20	0,16	0,00	2,25	0,49

Sumber : Hasil Susenas 2021-2022

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke tenaga kesehatan. Sebagian besar masyarakat Kota Surabaya memilih berobat jalan ke Praktek Dokter atau klinik. Pada tahun 2022 penduduk laki-laki yang berobat jalan ke praktek dokter atau klinik sebesar 40,89 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 34,57 persen. Puskesmas dan Rumah Sakit menempati posisi kedua dan ketiga yang menjadi tujuan berobat jalan yaitu 35,24 persen dan 32,77 persen.

Tempat rujukan berobat rumah sakit pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 15,13 persen menjadi sebesar 32,77 persen. Pada tahun 2022, tidak ada yang berobat jalan ke UKBM dan pengobatan tradisional. Sedangkan tempat berobat lainnya mengalami penurunan dari 2,25 persen pada tahun 2021 menjadi 0,49 persen pada tahun 2022.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih sangat tinggi di Kota Surabaya, hal ini menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat Surabaya untuk memeriksakan kesehatan pada tenaga medis modern. Kondisi ini juga diperkuat dengan pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/tidak terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis, yaitu penurunan persentase yang berobat ke praktek dokter/klinik dan peningkatan persentase yang berobat jalan ke rumah sakit. Hal ini memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan.

PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Angka Partisipasi Sekolah 2022

● 97,88% ● 97,77% ● 63,00%

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur

Angka Partisipasi Murni 2022

APM digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya

Rata-rata Lama Sekolah

2020

2021

2022

BAB 4 Pendidikan

Pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan Pendidikan.

Angka Buta Huruf

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia lima belas tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf.

Gambar 4.1 Persentase Angka Buta Huruf Kota Surabaya, Tahun 2020-2022
Sumber : Hasil Susenas 2021-2022

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya dapat dikatakan hampir terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Surabaya tahun 2022 dari penduduk usia di atas 15 tahun, sekitar 2,53 persen belum bisa membaca dan menulis. Sayangnya, angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,31 persen.

Gambar 4.2 Angka Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Kota Surabaya, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Hasil Susenas, 2022

Pada tahun 2022 angka buta huruf penduduk Kota Surabaya paling banyak pada kelompok umur di atas 70 tahun, yaitu 5,16 persen. Sedangkan pada kelompok umur 60-69 tahun angka buta huruf sebanyak 2,04 persen.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas 25 tahun.

G

ambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Kota Surabaya, Tahun 2020-2022 (Persen)

Sumber : Hasil Susenas, 2020-2022

Rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2022 mencapai 10,51 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10,51 tahun atau setara dengan kelas X tingkat SMA. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah Kota Surabaya sedikit mengalami kenaikan dari 10,50 tahun pada tahun 2021 menjadi 10,51 tahun pada tahun 2022.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Pada umumnya pendidikan yang tinggi akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang tinggi sebenarnya tidak menentukan kesuksesan seseorang dikemudian hari, namun kegigihan dan ketabahannya pada apa yang diperoleh selama masa pendidikan itulah yang memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.

Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kelas sosial. Sekolah menjadi saluran mobilitas masyarakat menuju status sosial yang lebih tinggi. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih, seseorang akan lebih dihargai di masyarakat sekaligus menunjukkan kemampuan secara ekonomi untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Telah dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 4.4 Perbandingan Persentase Penduduk Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2022

Sumber : Hasil Susenas, 2022

Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Surabaya masih belum begitu tinggi. Persentase penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 6,57 persen, tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 20,28 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 19,92 persen. Dengan demikian, sebanyak 46,77 persen penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah terlihat belum memenuhi target. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas 53,23 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 36,52 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D3), dan tamat sarjana ke atas, yang terbagi dalam D4/S1/S2/S3 masing-masing sebesar 0,15 persen dan 16,58 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009,

pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Umur penduduk dalam penghitungan APS pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/SMK. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surabaya Menurut Kelompok Usia, Tahun 2021-2022 (Persen)
 Sumber : Hasil Susenas, 2022

Secara umum, APS Kota Surabaya per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.6. APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 97,88 persen yang berarti bahwa 97,88 persen dari seluruh penduduk Kota Surabaya usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa) memandang tingkatan sekolahnya. APS kelompok usia 13-15 tahun Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 97,77 persen, lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kota Surabaya usia 13-15 tahun sebanyak 97,77 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 63,00 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 63 persen penduduk Kota Surabaya usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Jika dilihat dari jenis kelamin secara umum APS perempuan lebih rendah daripada APS laki-laki. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS laki-laki sebesar 98,30 persen dan APS perempuan 97,41 persen. Demikian halnya pada kelompok umur 13-15 tahun, APS laki-laki sedikit lebih tinggi dari pada APS perempuan, masing-masing sebesar 98,15 persen dan 97,43 persen. Pada kelompok usia 16-18 tahun nilai APS laki-laki dan perempuan tahun 2022 masing-masing sebesar 62,92 persen dan 63,09 persen.

Gambar 4.6 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surabaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2022 (Persen)

Sumber : Hasil Susenas, 2022

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM).

Mengikuti pendidikan dengan jenjang dan usia yang sesuai merupakan salah satu langkah persiapan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam kondisi normal, ketika anak dengan usia yang cukup siap bersekolah di jenjang yang sesuai, maka si anak akan lebih mudah menerima transfer ilmu karena lebih matang dalam memahami konsep dasar ilmu pengetahuan, sehingga hasil yang dicapai akan lebih memuaskan.

Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Surabaya, Tahun 2021-2022 (Persen)

Sumber : Hasil Susenas, 2022

APM digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara umum APM menurut kelompok usia di Kota Surabaya ditunjukkan pada gambar 3.8. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 97,34 persen atau turun sebesar 5,46 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2022 sebanyak 85,86 persen yakni turun sebesar 5,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. APM kelompok usia 16-18 tahun di Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 56,67 persen dapat diartikan penduduk Kota Surabaya tahun 2022 usia 16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 56,67 persen.

KETENAGAKERJAAN KOTA SURABAYA

Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT 2022
turun sebesar
2,06 persen**

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
2022

69,99%

**TPAK Kota Surabaya
2022 sebesar 69,99
persen mengalami
kenaikan 1,94 persen**

Tingkat
Pengangguran
Terbuka Menurut
Pendidikan 2022

Lulusan SMA

12,09%

Lulusan SMK

5,18%

Lulusan Univ

4,95%

Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan
Usaha 2022

**Penduduk yang
bekerja pada sektor
industri 21,79%. Sektor
pertanian yaitu
sebesar 0,55%. Sektor
jasa menjadi yang
paling besar yaitu
77,66%**

BAB 5 Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Pentingnya peranan tenaga kerja dalam proses rutin dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dan tidak pernah terlupakan. Karena tenaga kerja mempunyai dua sisi yang saling melekat satu sama lain. Sisi yang satu mengambil peranan fungsional dalam proses produksi yaitu bertindak sebagai faktor produksi. Sisi lain merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai konsumen penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Agustus tahun 2021 dan 2022. Indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat Pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari

pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 5.1
Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan kerja (Orang)	1.546.963	1.590.651	1.582.564	1.572.888	1.643.314
Bekerja (Orang)	1.454.049	1.499.094	1.427.668	1.420.615	1.518.038
Pengangguran (Orang)	92.914	91.557	154.896	152.273	125.276
TPT (%)	6,01	5,76	9,79	9,68	7,62

Sumber : Hasil Sakernas, 2018-2022

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 1,64 juta orang, bertambah sebanyak 70.426 orang dibanding tahun 2021. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini menunjukkan trend positif, hal ini sejalan dengan TPAK Kota Surabaya.

Gambar 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber : Hasil Sakernas, 2018-2022

TPAK Kota Surabaya 2022 sebesar 69,99 persen mengalami kenaikan 2,69 poin dibandingkan TPAK tahun 2021. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 69.99 persen penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 30,01 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Gambar 5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022 (Persen)

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2023

Ada beberapa kabupaten/kota mempunyai angka TPAK dibawah Kota Surabaya. Diantara kabupaten/kota tersebut, TPAK terendah adalah Kota Malang yaitu 63,08 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki TPAK diatas Kota Surabaya ada sebanyak 22 kabupaten/kota, TPAK paling tinggi adalah Kabupaten Pacitan dengan TPAK sebesar 82,99 persen.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber : Hasil Sakernas, 2018-2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2018-2022 TPT relatif berubah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 TPT Kota Surabaya sebesar 9,68 persen nilai ini turun 2,06 persen bila dibandingkan TPT 2022 yaitu sebesar 7,62 persen.

Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2023

Dilihat perbandingannya TPT Kota Surabaya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang nilai TPT nya diatas Kota Surabaya. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur nilai TPT-nya yang paling rendah Kabupaten Pacitan dan yang paling tinggi Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,80 persen.

Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran.

Tabel 5.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan,
Tahun 2021 dan 2022 (Persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
SD ke bawah	8,13	1,54
SMP	9,45	12,92
SMA	11,55	12,09
SMK	11,31	5,18
Universitas	7,66	4,95
Jumlah	9,68	7,34

Sumber : Hasil Sakernas, 2018-2022

Menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT tertinggi adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 12,92 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMP terdapat 12 orang yang menganggur. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama lulusan SMP.

Sejalan dengan naiknya TPT secara umum pada tahun 2022 menurut kelompok pendidikan juga mengalami menurunnya pada semua kategori pendidikan, mulai dari Pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, TPT pendidikan SD mengalami penurunan yang paling besar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya yaitu 8,13 persen pada 2021 menjadi 1,54 persen pada 2022.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Gambar 5.5 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2022 (Persen)
 Sumber : Hasil Sakernas, 2021-2022

Berdasarkan hasil Sakernas 2022, persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 dari 20,07 persen menjadi 21,79 persen. Disisi lain, penurunan terjadi di sektor pertanian yaitu sebesar 0,94 persen di tahun 2021 menjadi 0,55 persen di tahun 2022. Penurunan juga terjadi pada sektor jasa. Penduduk yang bekerja di sektor ini turun dibandingkan dengan tahun 2021, dari 78,99 persen di tahun 2021 menjadi 77,66 persen di tahun 2022. Secara keseluruhan, sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2022 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak/belum terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Surabaya.

Tabel 5.3
 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2020-2022 (Jiwa)

Kelompok Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	9.567	13.291	8.296
Industri	310.458	285.132	330.772
Jasa	1.107.643	1.122.192	1.178.970
Total	1.427.668	1.420.615	1.518.038

Sumber : Hasil Sakernas, 2022

Secara umum jumlah penduduk yang bekerja pada sektor kelompok usaha pertanian dan industri menduduki peringkat ketiga dan kedua setiap tahunnya. Sedangkan kelompok lapangan usaha pada sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar setiap tahunnya yaitu 78% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 33,39 persen. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri sebanyak 20,53 persen, sedangkan yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 17,49 persen. Sementara pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 2,75 persen tahun 2022.

Gambar 5.6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, Tahun 2022
 Sumber : Hasil Sakernas, 2022

Upah / Gaji / Pendapatan Bersih

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Gambar 5.7 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
 Sumber : Hasil Sakernas, 2022

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kabupaten/kota secara umum, sebanyak 8 kabupaten/kota memiliki upah diatas upah Provinsi Jawa Timur. Diantara 8 kabupaten/kota tersebut yang paling tinggi adalah upah Kota Surabaya sebesar 3.861.713, Kabupaten Sidoarjo sebesar 3.704.575, kemudian Kabupaten Gresik sebesar 3.503.063. Sedangkan upah terkecil di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Sampang yaitu sebesar 1,441,196.

TARAF DAN POLA KONSUMSI KOTA SURABAYA

Rata-rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan 2021-2022

Tahun 2021 **Rp. 810.743**

Tahun 2022 **Rp. 819.124**

Tahun 2022
pengeluaran penduduk
Kota Surabaya sebesar
40,67 persen untuk
konsumsi makanan

Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan 2021-2022

Tahun 2021 **Rp. 1.141.846**

Tahun 2022 **Rp. 1.149.824**

Pada tahun 2022 sebesar
59,33 persen untuk
konsumsi bukan makanan

Rata-rata Kuintil Pengeluaran per Kapita Sebulan Rp. 1.968.948

kuintil 1 adalah 20 % rumah
tangga yang mempunyai
pengeluaran perkapita
terendah, sebaliknya kuintil 5
adalah 20% rumah tangga
dengan pengeluaran perkapita
tertinggi

1	711.531
2	1.055.477
3	1.420.966
4	2.033.638
5	4.623.765

BAB 6 Taraf dan Pola Konsumsi

Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kota Surabaya mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Gambar 6.1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2021-2022 (Persen)
Sumber : Hasil Susenas, 2021-2022

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 6.1, selama 2021-2022 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 1.952.589,00 menjadi Rp 2.013.948,00. Pada Tahun 2022 sekitar Rp 819.124,00 atau 40,67 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp 1.149.824,00 atau 59,33 persen untuk konsumsi bukan makanan. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat Rp 810.743,00 atau 41,52 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp 1.141.846,00 atau 58,48 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan naik. Kenaikan pengeluaran pada kelompok bukan makanan sebesar 1,94 persen terjadi pada perumahan yaitu 33,22 persen pada tahun 2021 menjadi 35,16 persen pada tahun 2022.

Tabel 6.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2020-2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	810.743	819.124	41,52	41,60
Bukan Makanan	1.141,846	1,149.824	58,48	58,40
- Perumahan	648.570	708.150	33,22	35,16
- Barang dan Jasa	292.606	268.818	14,99	13,35
- Pakaian	31.821	28.293	1,63	1,40
- Barang Tahan Lama	61.186	38.982	3,13	1,94
- Lainnya	107.663	104.951	5,51	5,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Untuk melihat pembagian penduduk berdasarkan distribusi pengeluarannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan pengeluaran rumah tangga menjadi 5 kuintil (lima kelompok sama besar). Kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi.

Kuintil pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau tingkat pemerataan pendapatan/pengeluaran penduduk, yaitu dengan mengurutkan rata-rata pengeluaran per kapita dari yang terkecil hingga yang terbesar. Semakin tinggi kuintil pengeluaran maka semakin sejahtera, contohnya kuintil 1 (Q1) adalah 20 % rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita terendah (kelompok miskin), sebaliknya kuintil 5 (Q5) adalah 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi (kelompok kaya).

Tabel 6.2

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kuintil Pengeluaran, Tahun 2022 (Rupiah)

Kuintil	Rata-rata pengeluaran Per Kapita Sebulan
(1)	(2)
1	711.531
2	1.055.477
3	1.420.966
4	2.033.638
5	4.623.765
Rata-rata Keseluruhan	1.968.948

Sumber : Hasil Susenas, 2022

Rata-rata pengeluaran perkapita kuintil 1 (Q1) Kota Surabaya sebesar Rp 711.531,00, kuintil 2 (Q2) sebesar Rp 1.055.477,00, kuintil 3 (Q3) sebesar Rp 1.420.966,00, kuintil 4 (Q4) sebesar Rp 2.033.638,00 dan kuintil 5 (Q5) sebesar Rp 4.623.765,00. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita secara keseluruhan dalam lima kelompok (kuintil) tersebut adalah Rp 1.968.948,00.

Tabel 6.3

Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kota Surabaya, Tahun 2021-2022 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran Makanan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Padi-padian	62.351	62.090
Umbi-umbian	7.813	8.864
Ikan	66.175	67.029
Daging	51.018	54.816
Telur dan Susu	59.906	57.431
Sayur-sayuran	61.562	56.826
Kacang-kacangan	19.315	19.222
Buah-buahan	33.773	36.145
Minyak dan Lemak	17.655	23.735
Bahan Minuman	18.457	18.786
Bumbu-bumbuan	16.205	16.752
Konsumsi Lainnya	14.127	16.058
Makanan dan Minuman jadi	310.733	312.646
Rokok	71.653	68.725

Sumber : Hasil Susenas, 2021-2022

Pada tahun 2022 komponen pengeluaran terbesar penduduk Kota Surabaya adalah pada rata-rata pengeluaran kelompok makanan dan minuman jadi, yakni sebesar Rp 312.646,00. Selanjutnya kelompok rokok sebesar Rp 68.725,00. Lalu kelompok ikan sebesar Rp 67.029,00. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Surabaya paling kecil pada kelompok umbi-umbian sebesar Rp 8.864,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan mengalami kenaikan. Dan kenaikan terbesar adalah kelompok minyak dan lemak.

Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energi dan protein. Jumlah konsumsi energi dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein per hari.

Tabel 6.4

Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita Sehari, Tahun 2021-2022

Konsumsi	2021	2022
(1)		(2)
Energi (kkal)	2.087,95	1.972,97
Protein (gram)	64,25	62,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Selama periode 2020-2021 penduduk Kota Surabaya mengalami penurunan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 114,98 kkal. Pada tahun 2021 penduduk Kota Surabaya mampu mengkonsumsi energi/kalori rata-rata per hari sebesar 2.087,95 kkal dan tahun 2022 turun menjadi 1.972,97 kkal. Ini berarti konsumsi energi per hari penduduk Kota Surabaya di tahun 2022 belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kota Surabaya juga mengalami penurunan, yaitu dari 64,25 gram pada tahun 2021 turun 1,38 gram menjadi 62,87 gram pada tahun 2022. Ini menunjukkan konsumsi protein Kota Surabaya sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan yaitu 57 gram.

PERUMAHAN & LINGKUNGAN KOTA SURABAYA

Kualitas Rumah Tinggal 2022

Lantai bukan tanah	99,57%
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes	100%
Dinding terluas tembok dan kayu	99,31%

Sumber Penerangan Utama

pada tahun 2022

100%

rumah tangga menggunakan

sumber penerangan berupa listrik PLN

Status Kepemilikan 2022

57,46%

milik sendiri

42,54%

bukan milik sendiri

BAB 7 Perumahan dan Lingkungan

Rumah beserta fasilitas dan lingkungannya merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah. Semakin baik strata ekonomi rumah tangga memiliki kecenderungan semakin baik pula kondisi fisik rumah tinggal rumah tangga. Di sisi lain, faktor pengetahuan dan lingkungan juga turut memberi pengaruh akan kondisi ini. Saat ini rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup, lambang tingkatan sosial dan investasi.

Kondisi fisik rumah/bangunan tempat tinggal merupakan hal yang berkorelasi dengan kualitas hidup para penghuninya. Karena kualitas fisik bangunan tempat tinggal dapat langsung mempengaruhi derajat kesehatan mereka yang berada di dalamnya Jenis lantai rumah/ bangunan tempat tinggal umumnya berkaitan dengan status ekonomi rumah tangga serta dipengaruhi juga dimana permukiman tersebut berada.

Tabel 7.1
Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan,

Indikator Kualitas Perumahan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah	99,41	99,57
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes	99,90	100,00
Dinding terluas tembok dan kayu	99,40	99,31

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2021-2022

Berdasarkan data Susenas 2022, persentase rumah tangga di Kota Surabaya yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2022, rumah yang berlantaikan bukan tanah sebanyak 99,57 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,41 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2021 sekitar 99,90 persen rumah tempat tinggal beratap beton, genteng, sirap dan asbes di Kota Surabaya. Pada tahun 2022 seluruh rumah tempat tinggal di Surabaya beratap beton, genteng, sirap dan asbes.

Pada tahun 2022 kualitas perumahan di Kota Surabaya jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu sedikit penurunan menjadi sebesar 99,31 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 99,40 persen.

Gambar 7.1 Sumber Penerangan di Kota Surabaya, Tahun 2022

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Pada tahun 2022 sebanyak 100,00 persen rumah tangga di Kota Surabaya telah menikmati fasilitas penerangan listrik, dengan rincian sebesar 100 persen sumber penerangan berasal dari listrik PLN.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.2
Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal,
Tahun 2021-2022 (Persen)

Indikator Perumahan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	60,50	57,46
Bukan Milik Sendiri	39,50	42,54

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2021-2022

Rumah tangga di Kota Surabaya berdasarkan hasil Susenas 2022 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 57,46 persen dan sisanya sebesar 42,54 persen adalah bukan milik sendiri. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang sebesar 60,50 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepemilikan rumah dengan status bukan milik sendiri mengalami kenaikan dari 39,50 persen pada 2021 menjadi 42,54 persen pada tahun 2022.

KEMISKINAN KOTA SURABAYA

Perkembangan Penduduk Miskin 2018-2022

Pada tahun 2022

138.21

ribu orang miskin

Garis Kemiskinan 2022

652.540

rupiah/kapita/bulan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2022

0,69

poin

P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2022

0,18

poin

P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin

BAB 8 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Tabel 8.1
Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Surabaya, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Penduduk Miskin (Persen)
(1)	(2)	(3)
2018	140,81	4,88
2019	130,55	4,51
2020	145,67	5,02
2021	152,49	5,23
2022	138,21	4,72

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2018-2022

Selama tahun 2018-2022, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2018 penduduk miskin Kota Surabaya sebesar 4,88 persen, kemudian berturut-turut turun menjadi 4,51 persen pada 2019. Namun demikian, akibat dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen dan 5,23 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 4,72 persen.

Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota

Selama periode 2021 dan 2022 peringkat kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan persentase penduduk miskin tidak mengalami perubahan yang berarti, terdapat beberapa kabupaten yang peringkatnya bergeser, namun tidak ada yang bergesernya cukup signifikan. Beberapa kabupaten/kota saling bertukar tempat. Kabupaten Gresik pada 2021 peringkat 12 dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,63 persen, pada tahun 2022 menempati peringkat 13 dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,06 persen, bertukar tempat dengan Kabupaten Situbondo dari 12,42 persen pada 2021 menjadi 11,78 persen pada 2022. Kabupaten Nganjuk tahun 2021 peringkat 15 dengan persentase jumlah penduduk miskin dari 11,91 persen menjadi 11,7 persen atau peringkat 16 pada 2022 bertukar tempat dengan Kabupaten Madiun dari 11,85 persen pada 2021 menjadi 10,79 persen pada 2022. Kota Probolinggo pada 2021 peringkat 31 bertukar dengan Kabupaten Tulungagung menjadi peringkat 32 pada tahun 2022. Pada tahun 2021 peringkat 23 sampai dengan 26 berturut-turut ditempati Kabupaten Jombang, Lumajang, Blitar dan Pasuruan, pada tahun 2022 bergeser menjadi Kabupaten Lumajang, Jombang, Pasuruan dan Blitar.

Kabupaten di wilayah Madura memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding daerah lain, dimana peringkat 1 sampai dengan 3 adalah kabupaten-kabupaten di wilayah Madura. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 21,61 persen, ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur, diikuti Kabupaten Bangkalan 19,44 persen, Kabupaten Sumenep 18,76 persen. Persentase penduduk miskin terendah di Madura adalah di Kabupaten Pamekasan yaitu 13,93 persen atau menempati urutan ke-7. Sementara peringkat ke-4 sampai dengan ke-6 berturut-turut adalah sebagai berikut: Kabupaten Probolinggo 17,12 persen; Kabupaten Tuban 15,02 persen dan Kabupaten Ngawi 14,15 persen.

Gambar 8.1 Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2022 (Persen)

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2023

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan antar waktu selama 2018-2022.

Tabel 8.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya, Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	530.178	0,81	0,20
2019	567.474	0,62	0,15
2020	592.137	0,87	0,24
2021	611.466	0,75	0,17
2022	652.540	0,69	0,18

Sumber : Susenas 2022

Garis kemiskinan Kota Surabaya pada 2018 sebesar Rp 530.178,00. Besarnya garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun berikutnya naik 7,03 persen menjadi Rp 567.474,00 pada tahun 2019. Kemudian dari tahun 2019 ke 2020, garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan sekitar 4,35 persen, yaitu sebesar Rp Rp 567.474,00 menjadi Rp 592.137,00. Garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar Rp 611.466,00, lebih besar Rp Rp 19.329,00 dari garis kemiskinan tahun sebelumnya atau sekitar 3,26 persen. Pada tahun 2022, garis kemiskinan Kota Surabaya Rp 652.540,00, mengalami peningkatan 6,39 persen, lebih besar Rp 39.074,00 dari garis kemiskinan tahun 2021, ini adalah tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1, dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surabaya mecapai 0,81 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surabaya mengalami penurunan 0,19 poin menjadi 0,62. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surabaya naik 0,25 poin menjadi sebesar 0,87. Pada tahun 2021 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surabaya kembali mengalami penurunan sebesar 0,12 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,75. Pada tahun 2022, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surabaya mengalami penurunan 0,06 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,69. Penurunan P1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat. Dengan kata lain kedalaman kemiskinan penduduk Kota Surabaya berkurang.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) antar waktu. Pada tahun 2018 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya sebesar 0,20. Pada tahun 2019 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya menjadi 0,15 atau turun 0,05 poin dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 naik kembali sebesar 0.09 poin, nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya 0,24. Pada tahun 2021 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya turun 0,07 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,17. Pada tahun 2022, Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,18. Penurunan nilai P2 menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin menurun.

SOSIAL LAINNYA KOTA SURABAYA

Pada tahun 2022

82,20%

Penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet

Pada tahun 2022

88,07%

Penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun keatas yang menggunakan telepon selular

67,32%

Bekerja

3,91%

Pengangguran

6,35%

Sekolah

18,63%

Mengurus Rumah Tangga

3,79%

Lainnya

Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

BAB 9 Sosial Lainnya

Aspek sosial memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain aspek-aspek sosial yang telah diuraikan di muka, pada bagian ini akan dijelaskan aspek sosial lainnya yang mencakup akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, penerima kredit usaha, jenis kegiatan dan indeks pembangunan manusia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Menurut Karakteristik Akses Internet

Manusia dan teknologi di zaman modern ini memang tidak bisa terpisahkan, sehingga kebutuhan manusia akan teknologi membuat teknologi-teknologi baru bermunculan. Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Seperti contohnya fasilitas internet yang bisa dibilang hal wajib saat ini membuatnya mendapat tempat sebagai pusat informasi dan menjadi wadah trend pergaulan masyarakat kota besar di zaman modern ini, bukan lagi buku, koran, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan manusia lebih senang dengan sesuatu yang praktis dan cepat.

Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* dan membawa email, berita, hiburan dan file data.

Gambar 9.1 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Kota Surabaya yang Mengakses Internet, Tahun 2022 (Persen)
Sumber : Susenas 2022

Berdasarkan hasil Susenas 2022 terlihat bahwa penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet cukup besar, yakni 82,20 persen. Penduduk laki-laki Kota Surabaya berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet sebesar 83,11 persen. Sedangkan penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 75,56 persen. Dengan kata lain, penduduk laki-laki yang mengakses internet lebih banyak dibanding perempuan, yakni lebih besar 7,55 persen.

Gambar 9.2 Penduduk Berumur 5 tahun Keatas Kota Surabaya yang Menggunakan Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Susenas 2022

Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 88,07 persen penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun ke atas menggunakan telepon selular, terdiri dari 89,19 persen penduduk laki-laki dan 79,90 persen penduduk perempuan.

Pada satu sisi, perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan peradaban manusia, pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik, kini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi adalah ciptaan manusia, yang mana tujuan utama diciptakannya demi memudahkan atau meringankan aktivitas manusia. Jika manusia salah dalam memanfaatkan teknologi, maka akan berdampak negatif dalam hasilnya, dan sebaliknya, jika manusia dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang berguna pula.

Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Gambar 9.3 Penduduk Kota Surabaya Menurut Kegiatan, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Susenas 2022

Penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 67,32 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Terbanyak kedua aktivitas yang dilakukan penduduk adalah mengurus rumah tangga atau sebesar 18,63 persen. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga adalah ibu rumah tangga dan penduduk lansia (lanjut usia). Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah yang melakukan kegiatan sekolah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah sebesar 6,35 persen. Bersekolah yang dimaksud adalah menjalani pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Sisanya adalah penduduk yang melakukan kegiatan lainnya, seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 3,79 persen. Namun sebanyak 3,91 persen penduduk masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Pembagian kelompok penduduk tersebut berbeda menurut definisi ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada pembatasan usia penduduk. Jika dilihat menurut ketenagakerjaan, diukur dari penduduk yang bekerja dan melakukan aktivitas lainnya dengan usia 15 tahun ke atas.

Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha. Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim, hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Gambar 9.4 Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Surabaya, Tahun 2022 (Persen)
 Sumber : Susenas 2022

Dari total penerima kredit usaha di Kota Surabaya, berdasarkan data Susenas 2022, terbanyak menggunakan program koperasi sebesar 5,64 persen. Selain menggunakan program koperasi, penerima kredit Kota Surabaya menggunakan program bank selain KUR sebesar 4,01 persen. Pengguna KUR sebagai kredit usaha sebesar 5,29 persen. Kemudian pengguna kredit perorangan (dengan bunga) sebagai kredit usahanya sebesar 1,36 persen. Sedangkan yang menggunakan kredit usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 0,9 persen.

Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Hal ini karena koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit, melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.

Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak. Beberapa manfaat IPM yaitu; indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam perjalanan waktu Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

IPM Metode Baru, menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Produk Nasional Bruto (PNB) menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 9.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022 (Persen)
Sumber : BPS Kota Surabaya

Pada kurun waktu lima tahun terakhir IPM menunjukkan kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya mencapai 82,74. Secara umum IPM Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2022 mencapai nilai 72,75.

<https://surabayakota.bps.go.id>

Lampiran

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Komponennya, 2022

Kode	Prov/Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran (Ribu Rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3501	Kabupaten Pacitan	72,48	12,66	7,82	9.184,00	69,37
3502	Kabupaten Ponorogo	73,2	13,76	7,77	10.199,00	71,87
3503	Kabupaten Trenggalek	74,26	12,5	7,89	10.042,00	71
3504	Kabupaten Tulungagung	74,54	13,33	8,65	11.162,00	74,06
3505	Kabupaten Blitar	73,98	12,64	7,82	11.001,00	71,86
3506	Kabupaten Kediri	72,97	13,61	8,23	11.565,00	73,46
3507	Kabupaten Malang	72,95	13,38	7,68	10.326,00	71,38
3508	Kabupaten Lumajang	70,61	12,02	6,87	9.466,00	66,95
3509	Kabupaten Jember	69,68	13,44	6,5	9.840,00	67,97
3510	Kabupaten Banyuwangi	71,06	13,11	7,66	12.320,00	71,94
3511	Kabupaten Bondowoso	67,29	13,31	6,22	10.851,00	67,31
3512	Kabupaten Situbondo	69,62	13,18	6,63	10.263,00	68,25
3513	Kabupaten Probolinggo	67,78	12,58	6,13	11.254,00	66,96
3514	Kabupaten Pasuruan	70,55	12,76	7,42	10.726,00	69,68
3515	Kabupaten Sidoarjo	74,36	14,95	10,77	14.808,00	81,02
3516	Kabupaten Mojokerto	72,93	12,96	8,97	13.051,00	74,89
3517	Kabupaten Jombang	72,86	13,58	8,76	11.579,00	74,05
3518	Kabupaten Nganjuk	71,95	13,07	8,12	12.349,00	72,93
3519	Kabupaten Madiun	71,9	13,18	7,94	11.848,00	72,39
3520	Kabupaten Magetan	72,97	14,05	8,66	12.031,00	74,85
3521	Kabupaten Ngawi	72,81	12,84	7,59	11.563,00	71,75
3522	Kabupaten Bojonegoro	72,16	12,84	7,43	10.323,00	70,12
3523	Kabupaten Tuban	71,97	12,24	7,37	10.703,00	69,67
3524	Kabupaten Lamongan	72,86	14,01	8,33	11.648,00	74,02
3525	Kabupaten Gresik	72,99	13,96	9,75	13.384,00	77,16
3526	Kabupaten Bangkalan	70,54	11,91	5,97	8.971,00	65,05
3527	Kabupaten Sampang	68,38	12,39	5,06	8.944,00	63,39
3528	Kabupaten Pamekasan	68,03	13,67	6,88	8.967,00	66,99
3529	Kabupaten Sumenep	71,99	13,51	5,93	9.388,00	67,87
3571	Kota Kediri	74,34	15,44	10,45	12.762,00	79,59
3572	Kota Blitar	74,26	14,56	10,65	14.058,00	79,93
3573	Kota Malang	73,75	15,76	10,69	16.897,00	82,71
3574	Kota Probolinggo	70,68	13,67	9,29	12.571,00	74,56
3575	Kota Pasuruan	71,96	13,64	9,67	13.803,00	76,54
3576	Kota Mojokerto	73,74	14,02	10,8	14.054,00	79,32
3577	Kota Madiun	73,13	14,43	11,67	16.503,00	82,01
3578	Kota Surabaya	74,47	14,83	10,51	18.345,00	82,74
3579	Kota Batu	72,97	14,4	9,63	13.094,00	77,22
3500	Jawa Timur	71,74	13,37	8,03	11.992,00	72,75

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya, 2011-2022

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran (ribuan rupiah)	IPM	Rank IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	73,78	12,96	9,85	14.777,32	77,62	1
2012	73,8	13,05	9,95	15.104,14	78,05	1
2013	73,83	13,13	10,05	15.487,63	78,51	1
2014	73,85	13,44	10,07	15.492,16	78,87	2
2015	73,85	13,52	10,24	15.991,04	79,47	3
2016	73,87	13,99	10,44	16.295	80,38	2
2017	73,88	14,41	10,45	16.726	81,07	1
2018	73,98	14,78	10,46	17.157	81,74	1
2019	74,13	14,79	10,47	17.854	82,22	1
2020	74,18	14,8	10,49	17.755	82,23	1
2021	74,18	14,81	10,5	17.862	82,31	1
2022	74,47	14,83	10,51	18.345	82,74	1

Tabel 3. Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surabaya, 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)
Karangpilang	2,59	7.824
Jambangan	1,75	12.285
Gayungan	1,43	6.991
Wonocolo	2,61	11.518
Tenggilis	2,12	10.232
Gunung Anyar	2,17	6.209
Rungkut	4,29	5.459
Sukolilo	3,83	3.676
Mulyorejo	3	4.968
Gubeng	4,3	15.649
Wonokromo	5,02	17.517
Dukuh Pakis	1,97	5.488
Wiyung	2,48	5.908
Lakarsantri	2,07	3.138
Sambikerep	2,21	3.728
Tandes	3,03	9.310
Sukomanunggal	3,51	11.132
Sawahan	6,58	26.519
Tegalsari	3,19	21.265
Genteng	1,85	1.365
Tambaksari	7,46	2.420
Kenjeran	6,32	21.328
Bulak	1,54	751
Simokerto	3,02	33.186
Semampir	6,02	19.189
Pabean Cantian	2,46	13.103
Bubutan	3,14	23.193
Krembangan	3,78	12.674
Asemrowo	1,58	2.886
Benowo	2,5	2.886
Pakal	2,14	3.304
Kota Surabaya	100,00	8.633

Tabel 4. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Surabaya, 2021 dan 2022

Komoditas	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan		
Padi-padian	62.351,00	62.090,00
Umbi-umbian	7.813,00	8.864,00
Ikan/udang/cumi/kerang	66.175,00	67.029,00
Daging	51.018,00	54.816,00
Telur dan Susu	59.906,00	57.431,00
Sayur-sayuran	61.562,00	56.826,00
Kacang-kacangan	19.315,00	19.222,00
Buah-buahan	33.773,00	36.145,00
Minyak	17.655,00	23.735,00
Bahan	18.457,00	18.786,00
Bumbu-bumbuan	16.205,00	16.752,00
Konsumsi	14.127,00	16.058,00
Makanan	310.733,00	312.646,00
Rokok	71.653,00	68.725,00
Jumlah	810.743,00	819.124,00
Bukan Makanan		
Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	648.570,00	708.150,00
Aneka Komoditas dan Jasa	292.606,00	268.818,00
Pakaian	31.821,00	28.923,00
Komoditas tahan lama	61.186,00	38.982,00
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	90.540,00	91.979,00
Keperluan pesta dan upacara	17.123,00	12.972,00
Jumlah bukan makanan	1.141.846,00	1.149.824,00
Jumlah	1.952.590,00	1.968.948,00

Tabel 5. Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2020-2022 (dalam ribuan jiwa)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	1.377.342	1.411.590	2.788.932
2012	1.386.442	1.419.276	2.805.718
2013	1.393.749	1.428.180	2.821.929
2014	1.399.284	1.434.640	2.833.924
2015	1.406.683	1.441.900	2.848.583
2016	1.414.025	1.448.381	2.862.406
2017	1.420.182	1.454.517	2.874.699
2018	1.425.577	1.459.978	2.885.555
2019	1.430.988	1.465.207	2.896.195
2020	1.425.168	1.449.146	2.874.314
2021	1.427.872	1.452.412	2.880.284
2022	1.431.041	1.456.182	2.887.223

Tabel 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2022

Kode	Prov/Kab/Kota	TPT		TPAK	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3501	Kabupaten Pacitan	2,04	NA	80,57	82,99
3502	Kabupaten Ponorogo	4,38	5,51	72,63	72,92
3503	Kabupaten Trenggalek	3,53	5,37	72,36	72,01
3504	Kabupaten Tulungagung	4,91	6,65	72,26	71,95
3505	Kabupaten Blitar	3,66	5,45	70,44	72,79
3506	Kabupaten Kediri	5,15	6,83	69,34	68,73
3507	Kabupaten Malang	5,40	6,57	68,49	70,38
3508	Kabupaten Lumajang	3,51	4,97	66,19	69,75
3509	Kabupaten Jember	5,44	4,06	68,97	69,44
3510	Kabupaten Banyuwangi	5,42	5,26	72,32	72,00
3511	Kabupaten Bondowoso	4,46	4,32	73,89	74,61
3512	Kabupaten Situbondo	3,68	3,38	71,63	72,15
3513	Kabupaten Probolinggo	4,55	3,25	73,24	71,56
3514	Kabupaten Pasuruan	6,03	5,91	69,03	70,19
3515	Kabupaten Sidoarjo	10,87	8,80	66,47	72,87
3516	Kabupaten Mojokerto	5,54	4,83	70,47	71,34
3517	Kabupaten Jombang	7,09	5,47	70,69	66,65
3518	Kabupaten Nganjuk	4,98	4,74	64,24	66,79
3519	Kabupaten Madiun	4,99	5,84	67,77	72,72
3520	Kabupaten Magetan	3,86	4,33	73,31	74,03
3521	Kabupaten Ngawi	4,25	2,48	72,88	78,60
3522	Kabupaten Bojonegoro	4,82	4,69	71,84	72,16
3523	Kabupaten Tuban	4,68	4,54	73,77	73,63
3524	Kabupaten Lamongan	4,90	6,05	70,72	69,30
3525	Kabupaten Gresik	8,00	7,84	69,43	68,30
3526	Kabupaten Bangkalan	8,07	8,05	68,66	73,86
3527	Kabupaten Sampang	3,45	3,11	70,19	73,37
3528	Kabupaten Pamekasan	3,10	1,40	65,88	73,59
3529	Kabupaten Sumenep	2,31	1,36	75,63	75,12
3571	Kota Kediri	6,37	4,38	67,35	69,93
3572	Kota Blitar	6,61	5,39	69,96	67,78
3573	Kota Malang	9,65	7,66	67,59	63,08
3574	Kota Probolinggo	6,55	4,57	69,71	68,39
3575	Kota Pasuruan	6,23	6,18	71,66	68,05
3576	Kota Mojokerto	6,87	5,05	67,09	69,41
3577	Kota Madiun	8,15	6,39	66,87	66,85
3578	Kota Surabaya	9,68	7,62	67,30	69,99
3579	Kota Batu	6,57	8,43	73,74	71,51
3500	Jawa Timur	5,84	5,74	70,00	71,23

Tabel 7. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2022

Kode	Prov/Kab/Kota	Rata-Rata Upah
(1)	(2)	(3)
3501	Kabupaten Pacitan	1.786.677,00
3502	Kabupaten Ponorogo	2.031.927,00
3503	Kabupaten Trenggalek	1.980.385,00
3504	Kabupaten Tulungagung	2.004.240,00
3505	Kabupaten Blitar	1.870.019,00
3506	Kabupaten Kediri	1.995.620,00
3507	Kabupaten Malang	2.146.256,00
3508	Kabupaten Lumajang	1.822.185,00
3509	Kabupaten Jember	1.796.044,00
3510	Kabupaten Banyuwangi	1.961.497,00
3511	Kabupaten Bondowoso	1.725.556,00
3512	Kabupaten Situbondo	1.965.415,00
3513	Kabupaten Probolinggo	1.944.303,00
3514	Kabupaten Pasuruan	2.514.578,00
3515	Kabupaten Sidoarjo	3.704.575,00
3516	Kabupaten Mojokerto	2.682.139,00
3517	Kabupaten Jombang	2.541.462,00
3518	Kabupaten Nganjuk	2.109.117,00
3519	Kabupaten Madiun	2.380.896,00
3520	Kabupaten Magetan	2.317.763,00
3521	Kabupaten Ngawi	2.100.837,00
3522	Kabupaten Bojonegoro	2.243.607,00
3523	Kabupaten Tuban	2.269.937,00
3524	Kabupaten Lamongan	2.350.472,00
3525	Kabupaten Gresik	3.503.063,00
3526	Kabupaten Bangkalan	2.301.526,00
3527	Kabupaten Sampang	1.441.196,00
3528	Kabupaten Pamekasan	1.453.181,00
3529	Kabupaten Sumenep	2.088.186,00
3571	Kota Kediri	2.891.754,00
3572	Kota Blitar	2.400.146,00
3573	Kota Malang	3.059.773,00
3574	Kota Probolinggo	2.432.380,00
3575	Kota Pasuruan	2.645.211,00
3576	Kota Mojokerto	3.105.796,00
3577	Kota Madiun	2.645.732,00
3578	Kota Surabaya	3.861.713,00
3579	Kota Batu	2.218.479,00
3500	Jawa Timur	2.638.752,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**

Alamat : Jl. A. Yani No. 152 E, Tlp. (031) 8296692

Website : surabayakota.bps.go.id

Email : bps3578@bps.go.id